

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berkembang dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, dengan terus bertambahnya populasi di negara berkembang ini semakin banyak orang yang tinggal di lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada konsumsi dan aktivitas masyarakat oleh karena itu, pembangunan rumah yang sesuai dengan pertumbuhan ini menjadi penting. Namun rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi salah satu kendala utama, jika tidak dikelola dengan baik sampah dapat menimbulkan efek negatif. Untuk melindungi lingkungan pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang jelas dan mengedukasi masyarakat tentang isu lingkungan. Sampah sering kali di anggap sebagai barang yang tidak bermanfaat, dan hal ini menjadi masalah bagi setiap masyarakat terutama di kota-kota, jika tidak ditangani dengan baik sampah dapat membahayakan lingkungan dan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat¹.

Sampah adalah limbah yang bersifat padat atau setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan. Sumber limbah padat (sampah) perkotaan berasal dari permukiman, pasar, kawasan pertokoan, perdagangan, kawasan perkantoran, dan sarana umum, kawasan industri, peternakan hewan dan fasilitas umum lainnya². Hal ini sesuai dengan definisi yang di utarakan dalam Undang- Undang Pengelolaan Sampah No 18 Tahun 2008³.

Terdapat dua jenis tempat pembuangan sampah yang umum ada di Indonesia, yaitu Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Lingkungan akan menjadi kotor dan tidak teratur apabila cara penanganan dan pembuangan sampah tidak teratur, mencemari lingkungan, menimbulkan berbagai penyakit, pencemaran udara akibat pembakaran sampah atau penumpukan sampah lama, mencemari air tanah dan air 1 2 permukaan, merusak keindahan lingkungan, dan menimbulkan bau yang tidak sedap⁴.

Masalah sampah merupakan isu yang rumit karena melibatkan berbagai pihak. Salah satu tantangan utama terkait sampah di Indonesia adalah rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam mengelola limbah. Oleh karena itu, untuk mengurangi dan mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh sampah, dibutuhkan sistem pengelolaan yang holistik dan

berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan sampah yang efisien sangat diperlukan agar persoalan ini dapat diselesaikan⁵.

Permen LHK No. 1 Tahun 2024 menekankan bahwa sampah harus ditangani melalui tahapan yang jelas, yaitu: pemilahan, pengangkutan, pemanfaatan kembali, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Tahap pemilahan dilakukan sejak dari sumber sampah, baik di lokasi aktivitas maupun area pemukiman, dengan mengelompokkan sampah menjadi beberapa kategori, seperti sampah organik, anorganik, yang dapat didaur ulang, dimanfaatkan kembali, hingga yang mengandung B3. Hasil pemilahan ini kemudian masuk pada tahap pengangkutan, yang harus dilakukan dengan sarana angkut sesuai jenis sampah agar tetap terjaga¹.

Selanjutnya, sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dilakukan pemanfaatan kembali maupun pendauran ulang untuk mengurangi volume residu. Adapun sampah yang tidak dapat dimanfaatkan lagi diproses melalui metode pengolahan, seperti biodigester, termal, atau stabilisasi, dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi dan lingkungan. Sisa residu yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan akhirnya masuk ke tahap pemrosesan akhir, misalnya melalui lahan saniter.

Pada tahun 2023, volume sampah telah mengalami peningkatan signifikan di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir, dan tidak terlihat adanya indikasi bahwa tren ini akan melambat. Diperkirakan bahwa pada tahun yang akan datang, timbulan sampah kota diseluruh dunia akan meningkat sekitar 70 persen menjadi 3,4 miliar metrik ton. Sekitar 33 persen dari total sampah global saat ini tidak dikelola dengan baik⁶. Menurut data SIPSN, timbulan sampah di Indonesia

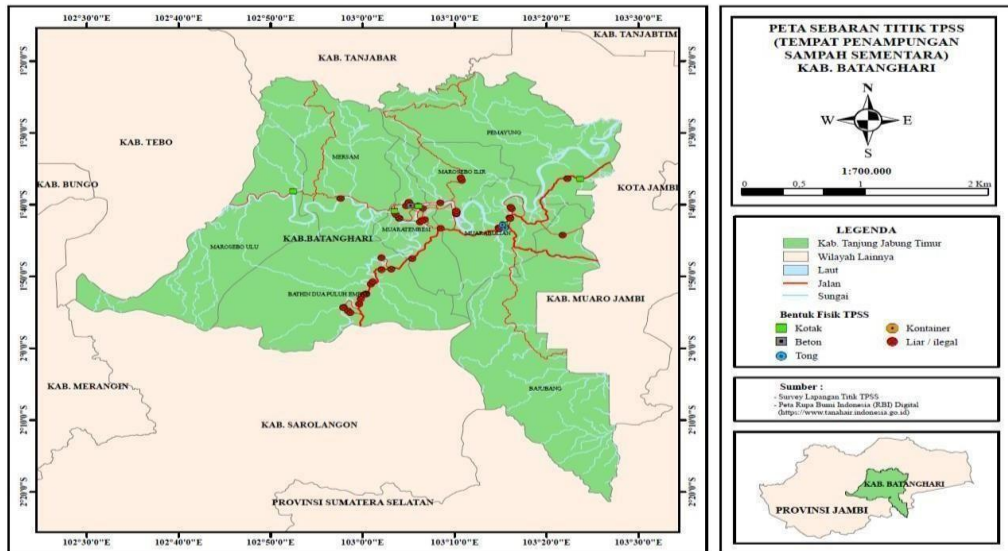
Pada tahun 2023 sebesar 69,9 juta ton. Berdasarkan komposisi sampah yang ada di Indonesia, didominasi oleh sampah sisa makanan sebesar 41,60% dan sampah plastik sebesar 18,71%. Sedangkan dari sisi sumber sampah, sampah terbanyak berasal dari Rumah Tangga dengan presentasi sekitar 44,37%⁷. Pada tahun 2023 Provinsi Jambi menghasilkan sampah sekitar 799,63 ton per hari, yang jika dihitung dalam setahun mencapai total 291.863,27 ton. Sampah di Provinsi Jambi ini berasal dari empat daerah, yaitu Kabupaten Bungo, Tebo, Kota Sungai Penuh dan kota Jambi. Dari jumlah sampah tahunan tersebut, Kota Jambi menyumbang jumlah terbesar, yakni 161,897,58 ton, diikuti pula dengan Kabupaten Bungo dengan 59.014,11 ton, Kabupaten Tebo sebanyak 52.546,28 ton, dan terakhir Kota Sungai Penuh yang menghasilkan 18.405,31 ton⁸.

Ditemukan bahwa salah satu permasalahan utama adalah kebiasaan masyarakat yang sering membuang sampah di tempat yang tidak sesuai, membuang sampah pada waktu yang tidak tepat, dan bahkan membuang sampah melebihi kapasitas yang ada. Sampah yang tersebar di luar area Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang disediakan menjadi indikasi rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, dengan sampah yang ditemukan di pinggir parit, tepi jalan Selain itu, kendaraan pengangkut sampah atau truk yang ada belum cukup memadai untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA.

Melihat dari beberapa penelitian di atas bahwa pelaksanaan program manajemen tempat penampungan sampah sementara masih terkendala karena kurangnya armada truk pengangkutan sampah, sarana- prasarana, dan biaya dari pemerintahan setempat. Serta kurang nya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik yaitu dengan pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah.

Kabupaten Batang Hari dengan luas daerah 5.804,83 km² merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jambi. Secara administratif Kabupaten Batang Hari terdiri dari 8 kecamatan, 110 desa, serta 20 kelurahan. Tercatat pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Batang Hari sebanyak 312.279 jiwa, dengan tingkatan perkembangan penduduk 2,12% per tahun. Dengan kenaikan perkembangan penduduk yang terus meningkat, pasti akan mempengaruhi terhadap kenaikan jumlah timbulan sampah. Maka semakin diperlukan pola manajemen sampah termasuk terkait dengan TPS dan TPA¹.

Dengan peta lokasi tempat penampungan sampah sementara di Kabupaten Batang Hari:

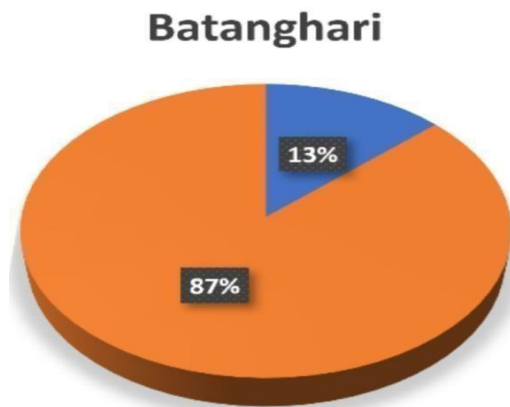


Sumber: Artikel Pemetaan dan Analisis Tempat Penampungan Sampah sementara di Provinsi Jambi

Gambar 1.1. Peta Lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kabupaten Batang Hari Tahun 2024

Dari data yang dilaporkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari mencatat volume sampah mencapai 31 ton per hari dalam kurun waktu beberapa bulan terdapat peningkatan jumlah tonase sampah di Kabupaten setempat khususnya di Kecamatan Muara Bulian, sebelumnya volume sampah hanya sekitar 27 ton per hari dan dari total volume sampah tersebut di dominasi jenis sampah organik domestik¹².

Jumlah sampah yang dihasilkan oleh Kabupaten Batang Hari tentunya berdampak pada distribusi tempat pembuangan sampah sementara (TPPS) yang sah maupun yang ilegal.dengan persentase yang dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut ini:



*Sumber: Artikel Pemetaan dan Analisis Tempat Penampungan Sampah
sementara di Provinsi Jambi*

**Gambar 1.2. Diagram Persentase TPSS Legal dan TPSS Ilegal di
Kabupaten Batang Hari Tahun 2024**

Berdasarkan diagram lingkaran di atas, distribusi TPSS yang sah di Kabupaten Batang Hari hanya mencakup 13%, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan persentase TPSS ilegal yang mencapai 87%. Pembuangan sampah di lokasi yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak serius bagi lingkungan, terutama di area yang menjadi tempat pembuangan sampah ilegal. Proses pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik sering kali menyebabkan pencemaran pada tanah dan air. Selain itu, pengelolaan sampah yang tidak efektif dapat merusak estetika lingkungan, menimbulkan bau tidak sedap, serta membawa dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Fenomena ini juga dapat mengganggu kelestarian fungsi ekosistem¹³. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sampah yang efektif dengan mengatur dan mengelola sampah secara terstruktur. George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* menyatakan bahwa "manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melibatkan upaya dari orang lain." Hal ini menggambarkan bahwa manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai sasaran

yang telah ditentukan dengan bekerja sama dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait¹.

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa titik lokasi tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) sebanyak 898 titik, diantaranya sebesar 6 13% merupakan Tempat Penampungan Sampah Sementara legal dengan rata-rata volume sebesar 37,7 m³ dan sebesar 87% merupakan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) Ilegal dengan rata-rata luas sebesar 21,01 m² 9. Pengelolaan persampahan di Batang Hari juga diawasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2016 ¹⁷.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kristian agung (2021) yang menemukan bahwa penanganan sampah seringkali tidak efektif karena terbatasnya dukungan pemerintah, baik dari segi pendanaan, jumlah tenaga kerja, maupun ketersediaan peralatan yang memadai. Selain itu, terdapat berbagai permasalahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan sampah, seperti aspek teknis operasional, kelembagaan, ekonomi, serta partisipasi masyarakat. Saat ini, paradigma pengelolaan sampah masih berfokus pada pendekatan "hasilkan, angkut, dan buang". Meskipun demikian, ada perhatian yang semakin besar terhadap potensi pengurangan sampah, khususnya sampah organik yang mudah terurai, dengan melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat¹⁹.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fadzoli Toif dkk (2023), terdapat beberapa hambatan utama dalam penerapan pengelolaan sampah di Indonesia. Beberapa faktor penghambat tersebut meliputi terbatasnya anggaran untuk pengelolaan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah, serta banyaknya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang belum memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan adanya kebutuhan yang cukup besar, anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah masih dirasa kurang, terutama dalam hal penyediaan fasilitas serta infrastruktur yang diperlukan, dan alokasi dana di berbagai daerah yang belum sepenuhnya dapat mencakup kebutuhan tersebut²⁰.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amal M dkk (2023) menunjukkan bahwa sebaran Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di Kecamatan Tembalang belum merata di seluruh kawasan pemukiman, karena ada beberapa daerah yang belum terjangkau oleh layanan TPS yang tersedia. Fenomena ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah TPS yang hanya mencapai 26 unit, sementara luas wilayah Kecamatan Tembalang sendiri mencapai 4050,732 hektar, sehingga 7 tidak semua kawasan dapat dilayani dengan baik²¹. Sejalan dengan hasil penelitian Ahmad Efendi

(2023), melalui pengamatan langsung di lapangan, ditemukan sebanyak 17 titik lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal yang memenuhi kriteria tertentu dan tersebar di wilayah Desa Gerisak Semenggelen. Keberadaan TPS ilegal ini menimbulkan masalah yang serius, yang berdampak buruk pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan pemandangan di sekitar area tersebut. Penyebab utama dari permasalahan ini antara lain terbatasnya akses ke tempat pembuangan sampah yang resmi serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai akibat buruk yang ditimbulkan oleh sampah yang dibuang sembarangan¹³. Berdasarkan hasil penelitian Kodi Rina Mariani Gobai (2020) mengatakan bahwa kinerja pengelolaan sampah masih tergolong kurang, terutama pada aspek operasional teknis yang mencakup pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan sampah. Ketidakefektifan dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut berdampak langsung pada penurunan kualitas lingkungan, karena sampah tidak dikelola dengan efektif dan efisien²².

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rana Djiha (2020) sejalan dengan temuan sebelumnya, yang menyatakan bahwa dengan jumlah timbulan sampah sebesar 2,16 kg per orang per hari, diperlukan adanya peningkatan signifikan dalam infrastruktur pengelolaan sampah untuk dapat mencapai target pelayanan sampah sebesar 100% dalam kurun waktu 10 tahun mendatang²⁴.

Peningkatan jumlah sampah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melampaui kapasitas yang tersedia, bahkan dapat menyebabkan beban yang berlebihan. Masalah sampah semakin rumit, dengan temuan bahwa kebiasaan membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada waktu yang tidak tepat, dan melebihi kapasitas tempat sampah, masih sering terjadi di masyarakat. Sampah yang berserakan di luar area TPS yang seharusnya, seperti di tepi parit, pinggir jalan, dan tempat lainnya, menunjukkan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat. Salah satu tantangan utama yang perlu mendapat perhatian adalah keterbatasan kapasitas dari tempat penampungan sampah sementara (TPS)²¹.

1.2 Rumusan Masalah

Tingginya jumlah timbulan sampah di Kabupaten Batang Hari yang mencapai sekitar 31 ton per hari telah berdampak terhadap penyebaran Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), di mana sebanyak 87% di antaranya berstatus ilegal. Kondisi ini diperburuk oleh kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak tepat waktu, serta melebihi kapasitas TPS yang tersedia. Sampah yang

berserakan di luar area penampungan menjadi bukti rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, keterbatasan armada pengangkutan, kurangnya tenaga kerja, dan sarana prasarana yang belum memadai turut menyebabkan pengelolaan sampah belum berjalan optimal.

Sehingga perlunya mengetahui bagaimana mekanisme manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Batang Hari yang sesuai dengan analisis manajemen PDCA. Plan (Perencanaan), Do (Pelaksanaan), Check (Pemeriksaan), dan Act (Tindakan) diterapkan sebagai pendekatan untuk menilai sejauh mana proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta tindak lanjut dalam pengelolaan sampah telah dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Batang Hari.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis Manajemen PDCA (Planning, Do, Check, Act) Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Batang Hari.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis proses perencanaan dalam manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Batang Hari.
2. Menganalisis tahap pelaksanaan dalam penerapan pengelolaan sampah di Kabupaten Batang Hari
3. Menganalisis kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Batang Hari.
4. Menganalisis tindakan perbaikan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Batang Hari

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Dinas Lingkungan Hidup

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi serta saran untuk evaluasi dalam mengurangi masalah sampah dan meningkatkan nilai estetika lingkungan, khususnya bagi Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Batang Hari.

1.4.2 Bagi Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dan sumber informasi, serta sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan penelitian selanjutnya, dan dapat dijadikan sebagai suatu masukan evaluasi bagi institusi.

1.4.3 Bagi Peneliti

Menambah pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti dalam menganalisis Permasalahan dengan memadukan teori yang telah di pelajari selama masa Perkuliahan.

1.4.4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat, sehingga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah di tempat penampungan sampah sementara untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.